



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 1 Februari 2021/Periodik - 2020)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PERTANIAN
UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : SARWO EDHY
2. Jabatan : DIREKTUR JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN
3. NHK : 277310

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN****Rp. 2.660.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 330 m2/160 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA TIMUR , WARISAN Rp. 850.000.000
2. Tanah Seluas 245 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000
3. Tanah Seluas 225 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA TIMUR , HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 440 m2/260 m2 di KAB / KOTA BREBES, WARISAN Rp. 250.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 72 m2/45 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 220.000.000
6. Tanah Seluas 161.5 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA TIMUR , HASIL SENDIRI Rp. 180.000.000
7. Tanah dan Bangunan Seluas 90 m2/36 m2 di KAB / KOTA BANDUNG, HASIL SENDIRI Rp. 220.000.000
8. Tanah Seluas 2940 m2 di KAB / KOTA BREBES, WARISAN Rp. 160.000.000
9. Tanah dan Bangunan Seluas 90 m2/36 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA TIMUR , HASIL SENDIRI Rp. 120.000.000
10. Tanah Seluas 980 m2 di KAB / KOTA BREBES, WARISAN Rp. 160.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN**Rp. 64.000.000**



1. MOBIL, TOYOTA YARIS MINIBUS Tahun 2008, HASIL SENDIRI
Rp. 60.000.000
2. MOTOR, YAMAHA SEPEDA MOTOR Tahun 2013, HASIL SENDIRI
Rp. 4.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 28.000.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 1.085.076.960

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 3.837.076.960

III. HUTANG Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 3.837.076.960

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.